

BAB IV

FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN MURSI DALAM MENGATASI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu masalah yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik maupun psikologis berakibat dari adanya *inequality* terhadap perempuan. Di Mesir, hal ini terjadi akibat adanya perbedaan gender sehingga kaum perempuan sering mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari kaum laki-laki, mereka menganggap kaum perempuan adalah makhluk yang lemah sehingga tidak dapat disetarakan dengan kaum laki-laki. Melihat hal ini, Presiden Mursi telah memberikan sebuah kesempatan kepada kaum perempuan untuk dapat mengeluarkan aspirasinya sesuai dengan janji Mursi sebelum adanya pemilihan Presiden. Ia mengatakan bahwa kaum perempuan berhak untuk ikut serta dalam lingkungan eksekutif pemilihan Presiden. Mursi memberikan apresiasi kepada kaum perempuan sebagai usaha untuk mengangkat kesulitan dan beban hidup yang dialami oleh masyarakat Mesir serta memberikan kesempatan bagi kaum perempuan untuk ikut serta dalam pemilihan yang berlangsung sebagaimana mereka keluar rumah untuk mendukung revolusi 25 Januari 2011 lalu. Setelah pemilihan berlangsung, kemenangan diraih oleh Mohamed Mursi yang mendapatkan 13.230.131 suara sementara Ahmed Shafiq sebagai saingan terberat mendapat 12.347.380, Mursi

merupakan calon presiden dari Partai Kebebasan dan Keadilan yang merupakan partai bentukan Ikhwanul Muslimin.⁷⁸ Ikhwanul muslimin merupakan sebuah partai yang memiliki ideologi bahwa adalah Islam itu sendiri. Yakni, Islam yang berasal dari Allah SWT, Al Quran sebagai pedoman hidup, dan diturunkan untuk seluruh umat manusia, tanpa kecuali.⁷⁹

Pasca terpilihnya Mursi sebagai Presiden Mesir tidak banyak perubahan yang terjadi mengenai kekerasan terhadap perempuan, kekerasan yang terjadi pada kaum perempuan Mesir berupa pelecehan seksual dimana kaum laki-laki melakukan tindakan berupa siulan yang *menggoda* serta sentuhan secara fisik yang merujuk kearah *seks*, hal ini telah membuktikan bahwa Mursi belum sepenuhnya memberikan perubahan terhadap hak asasi perempuan. Hak asasi perempuan bukan hanya memiliki hak untuk dapat bebas bergerak atau bepergian, memilih aktif di sebuah organisasi politik, mengeluarkan sebuah pendapat, dan memeluk agama sebagai hak pribadi. Akan tetapi, perempuan juga memiliki hak untuk melakukan kegiatan perdagangan seperti jual beli, memiliki sesuatu, mendapatkan atau melakukan pekerjaan yang layak, mendapatkan layanan dan perlindungan hukum, serta memiliki persamaan atas perlakuan, dan pembelaan hukum di pengadilan. Namun, Nihad Abu El-Komsan sebagai Direktur Pusat Hak Perempuan Mesir mengatakan bahwa ketidakstabilan politik, ketidakamanan

⁷⁸ Ibid, *Terpilihnya Muhammad Mursi, Gerakan Arab Spring & Akhir Zaman.*

<http://mangubed.wordpress.com/2012/06/25/terpilihnya-muhammad-mursi-gerakan-arab-spring-akhir-zaman/>

⁷⁹ Ibid, *Masa Depan Ikhwanul Muslimin.*

<http://www.eramuslim.com/berita/analisa/masa-depan-ikhwanul-muslimin.htm>

sosial dan kemiskinan ekonomi yang bertautan erat dengan budaya tradisi dan agama Mesir menjadi faktor utama meluasnya krisis moral di negara ini.⁸⁰

A. Kondisi Ekonomi Yang Memburuk Menyebabkan Munculnya Kekerasan

Menurut laporan IMF (Dana Moneter Internasional) kondisi ekonomi pada masa Husni Mubarak dapat dikatakan cukup baik. Produk domestik bruto (PDB) perkapita Mesir berdasarkan daya beli meningkat empat kali lipat dari 1981-2006 yakni US\$1.355 pada 1981 menjadi US\$ 2.525 pada 1991, US\$ 3.686 pada 2001 dan menjadi US\$ 4.535 pada 2006. Setidaknya dalam seperempat abad pada pemerintahan Mubarak ini mengalami pertumbuhan sekitar 4-5% termasuk pada tahun 2009 yang tumbuh menjadi 4,7%.⁸¹ Menurut catatan Bank Dunia, PDB Mesir pada 2009 tercatat sebesar US\$188 miliar, dengan penduduk 83 juta. Jumlah penduduk miskin di Mesir juga terus menurun. Pada 2009, populasi warga miskin terus turun dari 22,9 persen pada 1996 menjadi 16,7 persen pada 2000 dan 14 persen pada 2009 sedangkan angka pengangguran tertinggi pada 1995, yaitu sebanyak 11,3 persen. Angka pengangguran terendah pernah dicapai pada 1999, yaitu 8,1 persen. Pada akhirnya, angka pengangguran pada 2008 tercatat sedikit naik menjadi 8,7 persen.⁸²

⁸⁰ Ibid, *Dampak Sosial Ketegangan Politik Mesir*.

http://indonesian.irib.ir/hidden-17/-/asset_publisher/Pfp0/content/dampak-sosial-ketegangan-politik-di-mesir

⁸¹ Suprpto, Hadi, 2013. "Mesir, Calon Raksasa Ekonomi dari Sungai Nil," (*VIVAnews*. Rabu, 2 Februari 2011).

<http://hizbut-tahrir.or.id/2013/08/30/mengapa-mursi-gagal-memperbaiki-ekonomi-mesir/>

⁸² Ibid, (Suprpto, 2011)

Keadaan ini sesaat berubah ketika Mursi berkuasa, PBB memberitahukan pada Mei 2013, angka kemiskinan dan keamanan pangan di Mesir meningkat tajam dalam 3 tahun terakhir. PBB memperkirakan pada masa pemerintahan Mesir, 17% dari populasi warga Mesir harus berjuang untuk mendapatkan makanan yang cukup. Padahal, pada tahun lalu kemiskinan hanya mencapai 14%. Angka kekurangan gizi juga melesat menjadi 31%, khususnya bagi anak-anak di bawah 5 tahun. Jumlah tersebut naik sebanyak 23% dari 2005. Lebih dari 1 juta warga Mesir kehilangan mata pencaharian sejak 2010. Sebanyak 80% dari penganggur di negara tersebut berusia di bawah 30 tahun. Selain itu, 2 dari setiap 5 warga Mesir terus hidup dengan penghasilan kurang dari US\$ 2 per hari.⁸³

Indikator ekonomi makro pada masa Mursi juga mengalami penurunan, pertumbuhan ekonomi Mesir 2009, 5,1% turun hingga 2,2% pada 2012. Penurunan pertumbuhan ekonomi ini memperburuk tingkat pengangguran yang menyebabkan kemiskinan. Lebih dari 3,3 juta orang, 13% menganggur, dan 46,4% dari populasi warga di Mesir tidak dapat menemukan pekerjaan. Rakyat Mesir hidup di bawah garis kemiskinan sebesar 43%, karena mereka bekerja hanya mendapatkan upah di bawah dua dollar perhari. Hal yang memperparah keadaan adalah defisit anggaran pemerintah membengkak hingga 10,8% dari PDB, defisit ini membuat pemerintah Mesir makin kesulitan untuk membantu warga mereka yang paling miskin dalam kondisi yang sulit. 84 populasi warga yang tidak mendapatkan pekerjaan yakni sebagian besar adalah kaum laki-laki yang

⁸³ Herlinda, Wike Dita, 2013. "Kudeta Mursi Hentikan Penulihan Ekonomi Mesir," (*Bisnis.com*, Kamis, 04 Juli 2013)

<http://hizbut-tahrir.or.id/2013/08/30/mengapa-mursi-gagal-memperbaiki-ekonomi-mesir/>

⁸⁴ El Harmouzi, Nouh & Ali Massoud, 2013. "Sebab-Sebab Krisis Mesir," (*Akademimerdeka.org*, 4 Juli 2013)

<http://hizbut-tahrir.or.id/2013/08/30/mengapa-mursi-gagal-memperbaiki-ekonomi-mesir/>

berusia produktif diatas 20 tahun. Kebijakan ekonomi pemerintah Mesir yang memberikan upah dibawah 2 dollar kepada warga Mesir yang bekerja masih kurang untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, melihat hal seperti ini kaum perempuan berhak untuk menunjukkan produktivitas mereka sesuai dengan kemampuan. Namun, hal ini dinilai negatif oleh kaum laki-laki karena menurut mereka kaum perempuan hanya dapat melakukan pekerjaan yang berada didalam rumah. Akan tetapi, Mursi telah memperbolehkan kepada kaum perempuan untuk dapat melakukan pekerjaan diluar rumah seperti yang telah diberitakan kepada seluruh masyarakat Mesir bahwa pembawa acara berita di salahsatu stasiun televisi dibawakan oleh seorang perempuan bahkan mengenakan *nigab* atau sehelai kain penutup muka, serta adanya pramugari salah satu penerbangan domestik di Mesir yang telah memperbolehkan mengenakan hijab, karena kaum perempuan berhak mendapatkan hak untuk berkompetisi, akan tetapi mereka dihalangi untuk mendapatkan akses ke berbagai kesempatan pelatihan dan pendidikan yang memadai.

Namun, karena perbedaan tingkat pengangguran yang terjadi pada kaum laki-laki lebih tinggi yakni 51% sedangkan kaum perempuan 48,3% pada tahun 2013.⁸⁵ sehingga banyak kaum laki-laki yang turun ke jalan untuk melakukan berbagai cara untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Mereka melakukan berbagai tindakan negatif seperti pelecehan seksual terhadap kaum perempuan dari verbal maupun fisik seperti siulan yang *menggoda* dan sentuhan yang merujuk kearah *seks* bahkan timbulnya pemerkosaan apabila terjadi perlawanan

⁸⁵ Mesir - Tingkat Pengangguran. di akses 01/11/2013
<http://id.tradingeconomics.com/egypt/unemployment-rate>

karena anggapan mereka yang memandang rendah kaum perempuan. Aksi protes pun telah dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap kaum laki-laki, namun hal ini tidak memberikan hasil positif bagi kaum perempuan, melainkan hal tersebut bagi kaum laki-laki adalah bentuk *penyerahan diri* yang dilakukan oleh kaum perempuan kepada kaum laki-laki. Bagi mereka tindakan tersebut tidak pantas dilakukan oleh kaum perempuan karena sama saja dengan sengaja mereka membuka aurat didepan umum. Aksi protes di lapangan Tahrir Mesir yang dilakukan oleh kaum perempuan secara negatif dimanfaatkan oleh sekelompok orang kaum laki-laki untuk melakukan tindakan pelecehan, bahkan pemerkosaan pun dilakukan.

B. Kondisi Keamanan dan Hukum Belum Bisa Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan di Mesir

Lebih dari 90% kekerasan terhadap perempuan meningkat pada masa pemerintahan Mursi. Kekerasan yang berupa sentuhan secara fisik maupun verbal dapat memberikan pengaruh buruk bagi setiap orang yang mengalaminya terutama kaum perempuan. Dampak kekerasan itu sendiri memberikan efek jangka panjang, seperti: terjadi masalah pada kesehatan mental berupa depresi, tidak adanya rasa percaya diri, serta dapat melakukan penyalahgunaan obat-obatan terlarang.⁸⁶ Oleh karena itu menjaga diri dari berbagai perilaku atau hal buruk yang dapat menimbulkan kekerasan secara fisik maupun batin adalah hal

⁸⁶ *Efek kekerasan seksual*. 25/10/2013
http://forensik_sexual_abuse.webs.com/efekkekerasanseksual.htm

wajib yang harus dilakukan seorang perempuan, seperti yang telah dilakukan oleh kaum perempuan di Mesir. Mereka telah melakukan sebuah perlindungan diri dengan cara mengenakan pakaian yang menutup aurat bahkan tidak hanya mengenakan hijab, sehelai kain yang menutupi muka pun dikenakan, hal ini merupakan sebuah perlindungan diri dari kaum laki-laki yang tidak bertanggungjawab atas perilakunya. Namun, yang terjadi adalah kekerasan terhadap perempuan tetap saja terjadi. Sebelumnya, Mesir telah memiliki konstitusi yang telah mengatur tentang hak asasi perempuan, seperti pada era Mubarak dimana pada Piagam 1971 menyatakan bahwa negara membantu perempuan dalam biaya mengasuh anak dan menyeimbangkan tanggung jawab keluarga dan pekerjaan, serta satu pasal mewajibkan negara untuk memperlakukan perempuan dan laki-laki secara sama dalam “ranah politik, sosial, budaya dan ekonomi,” selama perlakuan tersebut tidak melanggar syariah dan secara jelas melarang diskriminasi gender.⁸⁷ Kondisi kaum perempuan yang terjadi pada masa pemerintahan Mubarak tidak sesuai dengan konstitusi yang ada, dimana kaum perempuan tidak diperkenankan untuk melakukan pekerjaan di luar rumah, pekerjaan mereka hanya sebatas pekerjaan rumah tangga, serta tidak memiliki hak untuk bepergian, mengikuti kegiatan politik, atau mengikuti jual beli dalam perdagangan, sehingga kaum perempuan tidak merasakan kesetaraan dengan kaum laki-laki.

Pada tanggal 25 Januari 2011, pemerintahan Mubarak terguling karena kepemimpinannya yang sangat keras dan berbasis militer. harapan kaum

⁸⁷ *Konstitusi Baru Mesir Tekankan Hukum Syariah*. 25/10/2013
<http://www.pikiran-rakyat.com/node/216490>

perempuan menjadi lebih baik karena turunya rezim Mubarak. Pasca runtuhnya rezim Mubarak, terjadi pemilihan presiden menggantikan Mubarak yang diharapkan menjadi lebih baik. Kandidat yang menggantikan Mubarak yakni Mohamed Mursi seseorang yang berasal dari sebuah organisasi islam Ikhwanul Muslimin yang memiliki tujuan menyebarkan islam dan berakhlak mulia. Dalam Janjinya, beliau mengatakan bahwa akan memberikan kesempatan bagi kaum perempuan untuk bisa mendapatkan hak-haknya dengan menjadikan mereka dapat bergerak bebas di lingkungan masyarakat serta bebas mengeluarkan aspirasinya. Dalam pemilihan presiden, kaum perempuan diberlakukan karena memiliki peran besar, yakni menurut Mursi kaum perempuan bisa menjadikan langkah awal nyata bagi kemajuan Mesir. Kaum perempuan sama halnya dengan kaum laki-laki sebagaimana kewajibannya. Mursi mengapresiasi kaum perempuan untuk ikut serta dalam pemilihan yang berlangsung sebagaimana mereka keluar rumah untuk mendukung revolusi 25 Januari 2011 lalu, karena kaum perempuan memiliki kontribusi yang besar dalam gerakan tersebut.

Pasca terpilihnya Mursi sebagai presiden, muncul sebuah konstitusi baru mengenai hak asasi perempuan, dimana konstitusi 2012 menyatakan bahwa Mesir menaati prinsip persamaan "untuk semua warga negara, perempuan dan laki-laki, tanpa diskriminasi atau nepotisme atau perlakuan yang memihak, baik dalam hal hak maupun kewajiban". Kemudian, sama seperti piagam 1971 bahwa negara membantu perempuan dalam biaya mengasuh anak dan menyeimbangkan tanggung jawab keluarga dan pekerjaan, serta satu pasal mewajibkan negara untuk memperlakukan perempuan dan laki-laki secara sama dalam "ranah politik, sosial,

budaya dan ekonomi," selama perlakuan tersebut tidak melanggar syariah dan secara jelas melarang diskriminasi gender serta dalam konstitusi baru tersebut mengandung pasal yang melarang negara melanggar hak dan kesempatan yang sama bagi warga negara. Dalam Piagam PBB pasal 8 juga mengatakan Perserikatan Bangsa-bangsa tidak membatasi pria dan wanita untuk dapat berpartisipasi dalam kemampuan apapun dan atas dasar syarat-syarat persamaan.⁸⁸ Dalam kenyataannya, setelah dua tahun kepemimpinan Mursi ia melanggar janji-janjinya. Pasal dalam konstitusi baru menyatakan semua warga negara setara yang dinyatakan sejak tahun 1971, namun sudah 40 tahun kaum perempuan Mesir mengalami diskriminasi diberbagai bidang dan hingga saat itu tidak ada hakim yang setara dengan kaum laki-laki.⁸⁹ Kasus pelecehan seksual yang dialami wanita di jalan-jalan Kairo, Mesir, semakin mengkhawatirkan. Kaum perempuan yang mengadakan aksi protes terhadap perlakuan kaum laki-laki dimana mereka turun menuju Lapangan Tahrir. Dalam aksinya, mereka mendapat tindakan buruk yang dilakukan oleh pasukan keamanan Mesir dimana mereka menyerang para pengunjung rasa yang melakukan aksi, mereka menyerang pengunjung rasa dengan memegang dadanya dan menarik baju hingga setengah telanjang di depan umum dan oknum polisi pun dengan kejam menendang demonstran perempuan ke arah dada dengan menggunakan alas kaki yang dikenakannya. Adapula pasukan keamanan Militer yang menarik demonstran perempuan pada trotoar dan dengan kasar melepas jilbabnya, selain itu pasukan tersebut juga *memberikan tendangan*

⁸⁸ Piagam PBB dan Statuta Mahkamah Internasional. 26/10/2013

http://unic.un.org/aroundworld/unics/common/documents/publications/uncharter/jakarta_charter_bahasa.pdf

⁸⁹ Tampan Terhadap Hak Perempuan Mesir. 26/10/2013

<http://www.dw.de/tampan-terhadap-hak-perempuan-mesir/a-16459925>

kepada aktivis di kepala sampai ia tidak dapat bergerak. Berdasarkan kejadian tersebut berbagai media internasional hadir, namun hal ini tidak membuat pasukan keamanan berhenti melainkan jika ada yang berani menuntut Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata (SCAF) kekuasaan yang dimiliki akan diturunkan.⁹⁰

Kondisi ini tak berubah setelah terpilihnya Mohamed Mursi, usai jatuhnya rezim Hosni Mubarak. Pelecehan dilakukan ditempat terbuka, kaum laki-laki dengan sengaja melakukan tindakan verbal seperti siulan bahkan fisik berupa tindakan yang merujuk ke arah *seks*. Melihat hal ini, undang-undang merupakan salah satu kendala sosial utama yang dihadapi perempuan. Perempuan masih mengalami diskriminasi terhadap keamanan yang berkaitan dengan keluarga, nasionalitas, hak untuk mengeluarkan aspirasi, serta hak untuk dapat hidup bebas dan layak. Hal ini membuat perempuan tidak dapat berpartisipasi secara mandiri dalam kehidupan publik⁹¹

⁹⁰ Kekejaman Militer Mesir Terhadap Demonstran Wanita Hebohkan Dunia Maya. diakses 02/11/2013
<http://www.darulkaustar.net/print.php?page=&ArticleID=4214>

⁹¹ Mencari Kekuasaan Politik-Perempuan Dalam Parlemen di Mesir, Yordania dan Libanon. Diakses 28/062013
http://www.idea.int/publications/wip/upload/CS_Egypt_Libanon_Jordan.pdf